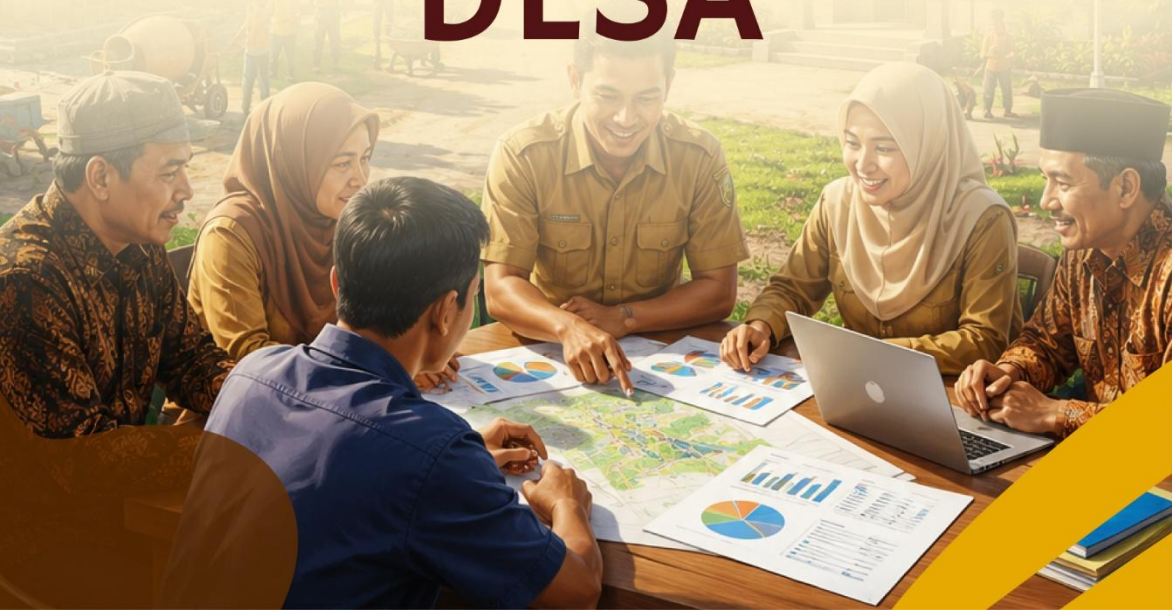


Editor: Dwi Saleha, SH., MH.
Sofian, SH., MH.

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA



Tata Kelola Pemerintahan Desa

Putri Rahmaini, S.I.P., M.I.P., dkk.

**Editor: Dwi Saleha, SH., MH., dan Sofian, SH.,
MH.**

PT CIPTA DIGITAL EDUKASI

Anggota IKAPI: No. 666/DKI/2026



Tata Kelola Pemerintahan Desa

Penulis : Putri Rahmaini, S.I.P., M.I.P., Yonnawati, S.H., M.H., Widia Novita Lukitasari WA, S.I.P., M.I.P., Anis Septiana, S.I.P., M.I.P., Muh Fichriyadi Hastira, S.I.P., M.Si., Muhammad Reza Fahlevy, S.Sos., M.Si., Asbudi, S.I.P., M.Si., Jefri, S.I.P., M.Si., Meri Carolina Siregar, S.IKom., M.I.P., Dea Rizky Amalia, S.Sos., M.Si., Jeni Rahmawati, S.I.P., M.I.P., Dewi Risnawati, M.A.P., M. Aviv Adhitya Putra Pratama, M.I.P., Kiki Fitriyani Ali Zen, S.I.P., M.I.P., dan Niken Nurmiyati, S.I.P., M.I.P.

ISBN : 978-634-7808-20-2 (PDF)

Penyunting Naskah : Dwi Saleha, SH., MH., dan Sofian, SH., MH.

Tata Letak : Fahrul Rozi

Desain Sampul : Novikean Keysah Sanisri

Penerbit

PT Cipta Digital Edukasi

Jl. Wijaya Ii/Wijaya Grand Centre Blok G-15, Desa/Kelurahan Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 1216

E-Mail : penerbitcde@gmail.com

Website : cideka.com

© Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Ketentuan Pidana Sanksi Pelanggaran Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan prebuttal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku referensi berjudul ***Tata Kelola Pemerintahan Desa*** dapat disusun dan diterbitkan. Buku ini hadir sebagai bahan bacaan yang membahas berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari tugas dan fungsi pemerintahan, pengelolaan administrasi, hingga pelayanan kepada masyarakat.

Materi dalam buku ini disajikan secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga dapat membantu pembaca mengenal prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik. Berbagai pembahasan yang disampaikan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran desa dalam mendukung pembangunan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat.

Buku ini diterbitkan untuk masyarakat umum dan dipasarkan secara luas agar dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki perhatian terhadap pemerintahan desa dan pembangunan masyarakat. Semoga buku ini memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi sumber informasi yang berguna bagi para pembaca.

Jakarta, Juni 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
Bab 1: Konsep dan Prinsip Dasar Pemerintahan Desa	1
Putri Rahmaini, S.I.P., M.I.P.	1
1.1 Pengertian dan Fungsi Pemerintahan Desa	1
1.1.1 Pengertian Pemerintahan Desa	2
1.1.2 Fungsi Pemerintahan Desa dalam Masyarakat	2
1.1.3 Peran Pemerintahan Desa dalam Pembangunan.....	3
1.2 Prinsip-Prinsip Tata Kelola Desa	4
1.2.1 Pengertian Tata Kelola Desa	4
1.2.2 Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas	5
1.2.3 Prinsip Partisipasi dan Keadilan	6
1.3 Peran Desa dalam Sistem Pemerintahan Nasional	7
1.3.1 Kedudukan Desa dalam Struktur Pemerintahan	7
1.3.2 Peran Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan.....	8
1.3.3 Peran Desa dalam Pemberdayaan dan Demokrasi Masyarakat.....	9
1.4 Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa serta Masyarakat.....	11
1.4.1 Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa	11
1.4.2 Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa	12
1.4.3 Hubungan Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pembangunan Desa.....	14

Bab 2: Dasar Hukum dan Regulasi Pemerintahan Desa di Indonesia	16
Yonnawati, S.H., M.H.....	16
2.1 Landasan Hukum Pemerintahan Desa.....	16
2.1.1 Undang-Undang sebagai Dasar Pemerintahan Desa	17
2.1.2 Peraturan Pemerintah dan Kebijakan Pendukung.....	17
2.1.3 Fungsi Landasan Hukum bagi Pemerintahan Desa	18
2.2 Kedudukan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan	19
2.3 Kebijakan Pemerintah tentang Desa.....	22
2.3.1 Dasar Kebijakan Pemerintah terhadap Desa.....	22
2.3.2 Kebijakan Pembangunan dan Pengelolaan Dana Desa	23
2.3.3 Tantangan dan Implementasi Kebijakan Desa	24
2.4 Peraturan Desa dan Implementasinya	26
2.4.1 Pengertian dan Fungsi Peraturan Desa	26
2.4.2 Proses Penyusunan dan Pelaksanaan Peraturan Desa....	27
2.4.3 Kendala dan Upaya Meningkatkan Implementasi Peraturan Desa	28
Bab 3: Struktur Organisasi dan Perangkat Desa	30
Widia Novita Lukitasari WA, S.I.P., M.I.P.	30
3.1 Pendahuluan	30
3.2 Konsep Otonomi Daerah	33
3.3 Konsep Dasar Pemerintahan Desa	36
3.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	38
3.5 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Desa	43
3.6 Mekanisme Kerja Pemerintahan Desa	46
3.7 Lembaga Kemasyarakatan Desa	50

3.8 Penutup	54
Bab 4: Peran Kepala Desa, Bpd dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	57
Anis Septiana, S.IP., M.IP.....	57
4.1 Pendahuluan Bab	57
4.2 Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 60	
4.3 Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa	64
4.4 Peran lembaga kemasyarakatan desa dalam Mendukung Pemerintahan Desa	68
4.5 Sinergi Kepala Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 72	
4.6 Tantangan dan Permasalahan dalam Pelaksanaan Peran Kelembagaan Desa	76
4.7 Penutup Bab	79
Bab 5: Perencanaan Pembangunan Desa: RPJMDes dan RKPDes	82
Muh Fichriyadi Hastira, S.IP., M.Si.	82
5.1 Konsep Perencanaan Pembangunan Desa	82
5.1.1 Pengertian Perencanaan Pembangunan Desa	82
5.1.2 Tujuan dan Prinsip Perencanaan Pembangunan Desa ...	85
5.1.3 RPJMDes dan RKPDes sebagai Instrumen Perencanaan Desa	91
5.2 Penyusunan RPJMDes	96
5.2.1 Pengertian dan Tujuan RPJMDes	96
5.2.2 Tahapan Penyusunan RPJMDes	99
5.2.3 Peran RPJMDes dalam Pembangunan Desa.....	101

5.3 Penyusunan dan Pelaksanaan RKPDes	103
5.3.1 Pengertian dan Tujuan RKPDes	103
5.3.2 Tahapan Penyusunan RKPDes	107
5.3.3 Pelaksanaan dan Evaluasi RKPDes	112
5.4 Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa.....	115
5.4.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa	115
5.4.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa	116
5.4.3 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa	118
Bab 6: Pengelolaan Keuangan Desa dan APBDes	121
Muhammad Reza Fahlevy, S.Sos., M.Si.	121
6.1 Sumber Pendapatan dan Keuangan Desa	121
6.1.1 Pengertian Keuangan Desa	121
6.1.2 Sumber Pendapatan Desa	122
6.1.3 Pengelolaan APBDes dalam Pemerintahan Desa	124
6.2 Penyusunan APBDes.....	126
6.2.1 Pengertian dan Fungsi APBDes.....	126
6.2.2 Tahapan Penyusunan APBDes	127
6.2.3 Peran APBDes dalam Pengelolaan Keuangan Desa....	128
6.3 Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Desa.....	129
6.3.1 Pengertian dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa ..	129
6.3.2 Pelaksanaan Keuangan Desa	131
6.3.3 Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	132
6.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	134

6.4.1 Pengertian Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	134
6.4.2 Proses Pelaporan Keuangan Desa.....	135
6.4.3 Pertanggungjawaban Keuangan Desa kepada Masyarakat	137
Bab 7: Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	140
Asbudi, S.IP., M.Si.	140
7.1 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Desa	140
7.1.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Desa	140
7.1.2 Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Desa	141
7.1.3 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Desa	143
7.2 Mekanisme Pengadaan di Desa	146
7.2.1 Pengertian dan Tujuan Pengadaan di Desa.....	146
7.2.2 Tahapan Mekanisme Pengadaan di Desa	147
7.2.3 Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Desa	148
7.3 Peran Tim Pengelola Kegiatan	149
7.3.1 Pengertian dan Kedudukan Tim Pengelola Kegiatan ..	149
7.3.2 Tugas dan Fungsi Tim Pengelola Kegiatan	150
7.3.3 Tantangan dan Upaya Peningkatan Kinerja Tim Pengelola Kegiatan	152
7.4 Pengawasan dalam Pengadaan Desa	153
7.4.1 Pengertian Pengawasan dalam Pengadaan Desa	153
7.4.2 Bentuk dan Mekanisme Pengawasan Pengadaan Desa	155
7.4.3 Tantangan Pengawasan dalam Pengadaan Desa.....	156
Bab 8: Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat	159

Jefri, S.IP., M.Si.	159
8.1 Pentingnya Transparansi dalam Pemerintahan Desa.....	159
8.1.1 Pengertian Transparansi dalam Pemerintahan Desa....	159
8.1.2 Manfaat Transparansi bagi Pemerintahan Desa	160
8.1.3 Tantangan Penerapan Transparansi dalam Pemerintahan Desa	162
8.2 Akuntabilitas Pengelolaan Desa.....	164
8.2.1 Pengertian dan Pentingnya Akuntabilitas Desa.....	164
8.2.2 Mekanisme Akuntabilitas dalam Pengelolaan Desa....	165
8.2.3 Tantangan dan Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Desa	166
8.3 Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan.....	168
8.3.1 Pengertian dan Pentingnya Partisipasi Masyarakat	168
8.3.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan	169
8.3.3 Hambatan dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.....	171
8.4 Media Informasi dan Keterbukaan Publik Desa.....	172
8.4.1 Pengertian Media Informasi dan Keterbukaan Publik Desa	172
8.4.2 Bentuk Media Informasi dalam Pemerintahan Desa ...	173
8.4.3 Peran Media Informasi dalam Meningkatkan Transparansi Desa.....	175
Bab 9: Pelayanan Publik dan Administrasi Desa	178
Meri Carolina Siregar, S.IKom., M.IP.	178
9.1 Jenis Pelayanan Publik di Desa	178
9.1.1 Pengertian Pelayanan Publik di Desa	178

9.1.2 Jenis-Jenis Pelayanan Publik di Desa	179
9.1.3 Tantangan dan Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Desa	181
9.2 Administrasi Pemerintahan Desa	183
9.2.1 Pengertian dan Fungsi Administrasi Pemerintahan Desa	183
9.2.2 Jenis Administrasi dalam Pemerintahan Desa.....	184
9.2.3 Peran Administrasi dalam Pelayanan dan Pembangunan Desa	186
9.3 Standar Pelayanan kepada Masyarakat	187
9.3.1 Pengertian dan Pentingnya Standar Pelayanan.....	187
9.3.2 Bentuk dan Pelaksanaan Standar Pelayanan.....	188
9.3.3 Hambatan dan Upaya Peningkatan Pelayanan Masyarakat.....	189
9.4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Desa	191
9.4.1 Pentingnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Desa.....	191
9.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Desa	192
9.4.3 Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Desa	194
Bab 10: Pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa	197
Dea Rizky Amalia, S.Sos., M.Si.	197
10.1 Jenis dan Sumber Aset Desa	197
10.1.1 Pengertian Aset dan Kekayaan Desa	197
10.1.2 Jenis-Jenis Aset Desa.....	198
10.1.3 Sumber Perolehan Aset Desa.....	200
10.2 Pemanfaatan Kekayaan Desa	202
10.2.1 Pengertian dan Jenis Kekayaan Desa	202

10.2.2 Mekanisme Pemanfaatan Kekayaan Desa	203
10.2.3 Peran Kekayaan Desa dalam Pembangunan dan Kesejahteraan.....	204
10.3 Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Desa.....	205
10.3.1 Pengertian dan Pentingnya Aset Desa	205
10.3.2 Bentuk Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Desa ...	207
10.3.3 Tantangan dan Upaya Pengelolaan Aset Desa	208
10.4 Pelaporan dan Pengawasan Aset Desa	210
10.4.1 Pentingnya Pelaporan Aset Desa	210
10.4.2 Mekanisme Pelaporan Aset Desa	211
10.4.3 Pengawasan Aset Desa	212
Bab 11: Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa	216
Jeni Rahmawati, S.IP., M.I.P.....	216
11.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	216
11.1.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Desa	216
11.1.2 Tujuan dan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Desa	217
11.1.3 Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	219
11.2 Pengembangan Potensi dan Usaha Desa	222
11.2.1 Pengertian Potensi dan Usaha Desa.....	222
11.2.2 Strategi Pengembangan Potensi Desa.....	223
11.2.3 Peran Pengembangan Usaha Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat	224
11.3 Peran BUMDes dalam Ekonomi Desa	225
11.3.1 Pengertian dan Tujuan Pembentukan BUMDes	225
11.3.2 Peran BUMDes dalam Pengembangan Ekonomi Desa	226

11.3.3 Tantangan dan Upaya Pengembangan BUMDes	227
11.4 Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi	229
11.4.1 Pentingnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa	229
11.4.2 Bentuk Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa.....	230
11.4.3 Faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi	232
Bab 12: Pengawasan, Audit, dan Penegakan Hukum di Desa	235
Dewi Risnawati, M.A.P.....	235
12.1 Sistem Pengawasan Pemerintahan Desa	235
12.1.1 Pengertian Sistem Pengawasan Pemerintahan Desa..	235
12.1.2 Bentuk dan Mekanisme Pengawasan Pemerintahan Desa	236
12.1.3 Tantangan dalam Pengawasan Pemerintahan Desa ...	238
12.2 Audit dan Pemeriksaan Desa.....	240
12.2.1 Pengertian dan Tujuan Audit Desa	240
12.2.2 Mekanisme Pelaksanaan Audit dan Pemeriksaan Desa	241
12.2.3 Peran Audit dalam Meningkatkan Tata Kelola Desa	242
12.3 Pencegahan Penyimpangan dan Korupsi	244
12.3.1 Pengertian Penyimpangan dan Korupsi dalam Pemerintahan Desa	244
12.3.2 Faktor Penyebab Penyimpangan dan Korupsi di Desa	245
12.3.3 Upaya Pencegahan Penyimpangan dan Korupsi	246
12.4 Penegakan Hukum dan Penyelesaian Masalah Desa	248

12.4.1 Pentingnya Penegakan Hukum dalam Pemerintahan Desa	248
12.4.2 Bentuk Permasalahan yang Terjadi di Desa	249
12.4.3 Mekanisme Penyelesaian Masalah Desa	251
Bab 13: Teknologi Informasi Dan Desa Digital.....	254
M. Aviv Adhitya Putra Pratama, M.I.P.....	254
13.1 Teknologi Informasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa	254
13.1.1 Kerangka Konseptual: Dari E-Government Menuju Digital Governance	254
13.1.2 Landasan Hukum dan Kebijakan Nasional.....	256
13.1.3 Perkembangan Teknologi dan Implikasinya bagi Pemerintahan Desa	258
13.2 Sistem Informasi Desa: Arsitektur Digital Pemerintahan Desa	260
13.2.1 Pengertian, Kedudukan Hukum, dan Fungsi Sistem Informasi Desa	260
13.2.2 Arsitektur dan Ekosistem Sistem Informasi Desa	262
13.2.3 Pengelolaan Data dan Prinsip Tata Kelola Informasi Desa	263
13.2.4 Peran SID dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa	265
13.3 Transformasi Pelayanan Publik Desa melalui Digitalisasi	266
13.3.1 Konsep dan Kerangka Teoritis Pelayanan Publik Digital	266
13.3.2 Bentuk dan Implementasi Pelayanan Digital di Desa	268

13.3.3 Inovasi Pelayanan Publik Desa: Studi Kasus dan Praktik Terbaik.....	269
13.3.4 Hambatan Transformasi Digital Layanan Publik Desa	270
13.4 Tantangan, Peluang, dan Strategi Pengembangan Desa Digital.....	272
13.4.1 Analisis Ekosistem Desa Digital: Antara Potensi dan Risiko.....	272
13.4.2 Tantangan Multidimensi Pengembangan Desa Digital	274
13.4.3 Peluang Strategis Pengembangan Desa Digital	275
13.4.4 Strategi Pengembangan Desa Digital yang Berkelanjutan.....	277
13.4.5 Indikator Keberhasilan Desa Digital	280
Rangkuman.....	282
Bab 14: Kerjasama Antar Desa dan Hubungan dengan Pemerintah Daerah	284
Kiki Fitriyani Ali Zen, S.IP., M.I.P.	284
14.1 Bentuk Kerjasama Antar Desa	284
14.1.1 Pengertian Kerjasama Antar Desa	284
14.1.2 Bentuk-Bentuk Kerjasama Antar Desa.....	285
14.1.3 Manfaat dan Tantangan Kerjasama Antar Desa	287
14.2 Hubungan Desa dengan Pemerintah Daerah	290
14.2.1 Kedudukan Desa dalam Pemerintahan Daerah.....	290
14.2.2 Bentuk Hubungan Desa dengan Pemerintah Daerah.....	291
14.2.3 Peran Kerja Sama Desa dan Pemerintah Daerah	292
14.3 Peran Pendamping dan Pembinaan Desa	293

14.3.1 Pengertian Pendamping dan Pembinaan Desa.....	293
14.3.2 Peran Pendamping dalam Pembangunan Desa.....	294
14.3.3 Pembinaan Desa dan Tantangan Pelaksanaannya	295
14.4 Sinergi Pembangunan Desa dan Daerah	297
14.4.1 Pengertian Sinergi Pembangunan Desa dan Daerah..	297
14.4.2 Bentuk Sinergi antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.....	298
14.4.3 Manfaat dan Tantangan Sinergi Pembangunan Desa dan Daerah.....	300
Bab 15: Evaluasi, Inovasi, dan Penguatan Tata Kelola Desa	304
Niken Nurmiyati, S.I.P., M.I.P.....	304
15.1 Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa	304
15.1.1 Pengertian Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa	304
15.1.2 Aspek-Aspek Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa..	305
15.1.3 Upaya Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa	307
15.2 Inovasi dalam Pengelolaan Desa.....	310
15.2.1 Pengertian dan Pentingnya Inovasi Desa.....	310
15.2.2 Bentuk Inovasi dalam Pengelolaan Desa.....	311
15.2.3 Dampak Inovasi terhadap Pembangunan Desa.....	312
15.3 Penguatan Kapasitas Aparatur Desa.....	313
15.3.1 Pengertian dan Pentingnya Penguatan Kapasitas Aparatur Desa	313
15.3.2 Bentuk Penguatan Kapasitas Aparatur Desa	314
15.3.3 Tantangan dan Upaya Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa	316
15.4 Strategi Mewujudkan Tata Kelola Desa yang Baik	317
15.4.1 Pengertian Tata Kelola Desa yang Baik	317

15.4.2 Strategi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa .	319
15.4.3 Tantangan dan Upaya Mewujudkan Tata Kelola Desa yang Baik	320
Daftar Pustaka.....	324
Profil Penulis	346

Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2022). *Pembangunan desa partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, R. (2023). *Pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amelia, R. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 45–56.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ardiansyah. (2023). Peran kepala dusun dalam tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 112–120.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
<https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2022). *Laporan kinerja SISKEUDES 2022*. BPKP.
- Bastian, I. (2020). *Akuntansi sektor publik di Indonesia*. BPFE.
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2012). Mode 3 knowledge production in quadruple helix innovation systems: 21st-century democracy, innovation, and entrepreneurship for

- development. *Springer Briefs in Business*, 7, 1–63.
https://doi.org/10.1007/978-1-4614-2062-0_1
- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience. *World Development*, 22(9), 1253–1268.
[https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90003-5](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90003-5)
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (2007). *Decentralizing governance: Emerging concepts and practices*. Brookings Institution Press.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). *Rural development participation: Concepts and measures for project design, implementation and evaluation*. Cornell University.
- Conyers, D. (1982). *An introduction to social planning in the third world*. John Wiley & Sons.
- Darmi, T., & Mujtahid, I. M. (2024). *Sistem kelembagaan pemerintahan desa*. Bandung: Litnus.
- Darmi, T., & Mujtahid, I. M. (2024). *Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa*. Bandung: Penerbit Litnus.
- Eko, S. (2020). *Desa membangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Eko, S., dkk. (2014). *Desa membangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Fauzi, M. (2023). Pelayanan publik di tingkat desa berbasis digital. *Jurnal Administrasi Negara*, 11(3), 78–89.
- Firman, et al. (2021). Penerapan prinsip partisipatif dan transparan dalam pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*.

- Handayani, E., Garad, A., Suyadi, A., & Tubastuvi, N. (2023). Increasing the performance of village services with good governance and participation. *World Development Sustainability*, 3, 100089. <https://doi.org/10.1016/j.wds.2023.100089>
- Harahap, A. (2021). Struktur organisasi pemerintahan desa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 10(2), 101–110.
- Hardiyansyah. (2020). Kualitas pelayanan publik: Konsep, dimensi, indikator, dan implementasinya (Edisi Revisi). Gava Media.
- Hardiyansyah. (2020). Kualitas pelayanan publik: Konsep, dimensi, indikator, dan implementasinya. Gava Media.
- Hardiyanti, S., & Zetra, A. (2021). Partisipasi politik dalam perencanaan pembangunan di Desa Lubuk Tenam, Jambi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Heeks, R. (2006). *Implementing and managing e-government: An international text*. SAGE Publications.
- Hidayat, A., & Nugroho, F. (2021). Kerjasama antar desa dalam meningkatkan efektivitas pembangunan desa. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 85–98.
- Hidayat, A., & Nugroho, F. (2022). Pengelolaan aset desa dalam mendukung pembangunan ekonomi desa. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 58–71.
- Hidayat, A., & Nugroho, F. (2022). Penyelesaian konflik desa berbasis musyawarah dalam mendukung stabilitas sosial masyarakat desa. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 82–95.

- Hidayat, A., & Prasetyo, D. (2021). Transparansi pengadaan barang dan jasa desa dalam mendukung pembangunan desa. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 8(2), 91–104.
- Hidayat, A., & Prasetyo, D. (2022). Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pelayanan publik desa. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 71–84.
- Hidayat, A., & Prasetyo, D. (2022). Penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis transparansi dan partisipasi masyarakat. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 84–97.
- Hidayat, A., & Prasetyo, D. (2022). Transparansi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 61–74.
- Hidayat, A., & Rahman, F. (2021). Evaluasi kinerja pemerintahan desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik desa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(2), 88–101.
- Hidayat, A., & Wicaksono, D. (2022). Pemberdayaan masyarakat desa berbasis partisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 63–76.
- Hidayat, R., et al. (2025). Why democratization and decentralization in Indonesia have mixed results on the ground: A systematic literature review. *Public Administration and Development*. <https://doi.org/10.1002/pad.2095>
- Hidayat, T. (2021). *Administrasi pemerintahan desa*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Hilmawan, R., et al. (2023). Village Fund Program, poverty and inequality in rural Indonesia. *Journal of Rural Studies*.
- Holle, E. S., et al. (2023). Otonomi daerah. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Holle, E. S., et al. (2023). Otonomi daerah. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Indrajit, R. E. (2021). Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital. Andi Offset.
- Janowski, T. (2015). Digital government evolution: From transformation to contextualization. *Government Information Quarterly*, 32(3), 221–236. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.001>
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). Pedoman pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam pembangunan desa. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). (2021). Panduan desa digital. Kemendes PDTT.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2019). Teknik penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Kemendes PDTT.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Kebijakan Dana Desa 2023. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI.

- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). (2023). Laporan tahunan infrastruktur digital 2023. Kemenkominfo.
- Kurniawan, A., & Setiawan, D. (2021). Akuntabilitas pelaporan keuangan desa dalam mewujudkan transparansi pemerintahan desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 15(2), 89–101.
- Kurniawan, D. (2020). Kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, T. (2020). Pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Rajawali Pers.
- Kusuma, I. (2022). Efektivitas struktur organisasi pemerintahan desa. *Jurnal Governance*, 13(1), 33–44.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management information systems: Managing the digital firm* (16th ed.). Pearson.
- Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional e-government: A four-stage model. *Government Information Quarterly*, 18(2), 122–136. [https://doi.org/10.1016/S0740-624X\(01\)00066-1](https://doi.org/10.1016/S0740-624X(01)00066-1)
- Lestari, S. (2022). Peran PKK dan Karang Taruna dalam pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 66–75.
- Lindawaty, S. (2023). Pembangunan desa pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/4120>

- Mahmud, A. (2025). Transparency and accountability in village fund management. *Proceedings of International Conference on Economics, Business, and Economic Education*. Universitas Negeri Semarang. <https://proceeding.unnes.ac.id/ice-bess/article/view/4624>
- Maksum, I. R. (2021). *Riak-riak otonomi daerah di Indonesia kurun waktu 2010–2021*. Yogyakarta: Deepublish.
- Maksum, I. R. (2021). *Riak-riak otonomi daerah di Indonesia kurun waktu 2010–2021*. Yogyakarta: Deepublish.
- Megawati, S., et al. (2024). Community participation in preparing the Village Government Working Plan. *Journal of Social Dynamics and Governance (JSDG)*, 1(1), 37–50. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jsdg/article/download/35640/12294>
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Miftahuddin. (2018). Transparansi pengelolaan keuangan desa dan distribusi kesejahteraan. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*.
- Mulkan, H., & Aprita, S. (2023). *Hukum otonomi daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mulkan, H., & Aprita, S. (2023). *Hukum otonomi daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Nugroho, D., & Prasetyo, H. (2022). Penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui evaluasi kinerja aparatur desa. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 11(1), 76–89.
- Nugroho, D., & Prasetyo, H. (2022). Sinergi pembangunan desa dan daerah dalam meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah. *Jurnal Pemerintahan dan Pembangunan Desa*, 11(2), 80–94.
- Nugroho, F., & Rahman, A. (2021). Pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap kemandirian ekonomi desa. *Jurnal Pembangunan Desa dan Masyarakat*, 9(2), 88–101.
- Nugroho, R. (2020). Otonomi desa dan pembangunan lokal. Jakarta: Gramedia.
- Nugroho, R., & Suprpto, F. A. (2021). Administrasi pemerintahan desa bagian 2: Organisasi pemerintahan desa. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R., & Suprpto, F. A. (2021). Administrasi Pemerintahan Desa Bagian 2: Organisasi Pemerintahan Desa. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, H. (2020). Pemerintahan desa dan implementasi kebijakan desa. Grasindo.
- Nurcholis, H. (2020). Pemerintahan desa dan kapasitas aparatur desa. Grasindo.
- Nurcholis, H. (2020). Pemerintahan desa dan manajemen desa. Grasindo.
- Nurcholis, H. (2020). Pemerintahan desa dan manajemen pembangunan desa. Grasindo.

- Nurcholis, H. (2020). Perencanaan partisipatif pembangunan desa. Grasindo.
- Nurcholis, H. (2021). Pemerintahan desa dalam perspektif administrasi publik. Grasindo.
- Nurcholis, H. (2021). Pemerintahan desa dan manajemen desa. Grasindo.
- Nurcholis, H. (2021). Pemerintahan desa dan manajemen desa. Grasindo.
- Nurcholis, H. (2021). Pemerintahan desa dan pembangunan lokal. Jakarta: Erlangga.
- Nurcholis, H. (2021). Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta: Erlangga.
- Nurhidayati, S., & Suryono, A. (2021). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa berbasis kebutuhan lokal. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 6(2), 88–101.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020

- tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Prabowo, R., & Lestari, D. (2022). Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pembangunan desa. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 9(1), 34–47.
- Pradita, D. (2020). Otonomi desa dan tata kelola pemerintahan desa di era desentralisasi. *Jurnal Pemerintahan Lokal*.
- Prasetyo, A., & Hidayat, T. (2023). Capacity building of village officials in improving rural governance in Indonesia. *Journal of Rural Development*, 42(1), 77–91.
- Prasetyo, D., & Nugroho, F. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa berbasis potensi lokal. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 10(1), 77–90.
- Prasetyo, D., & Rahman, F. (2021). Transparansi pengelolaan aset desa dan pengaruhnya terhadap kemandirian desa. *Jurnal Pemerintahan dan Pembangunan Desa*, 9(2), 92–105.
- Prasetyo, D., & Rahman, F. (2022). Digitalisasi pengadaan desa dalam meningkatkan transparansi dan pengawasan publik. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 11(1), 72–85.
- Pratama, B. (2022). Peran kepala dusun dalam pelayanan masyarakat. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 8(1), 55–63.
- Pratama, R., & Hidayat, A. (2022). Akuntabilitas pengelolaan APBDes dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Keuangan dan Administrasi Publik*, 9(1), 66–78.

- Prihatin, R., et al. (2024). Village fund allocation and community welfare: A participatory governance analysis. *Journal of Rural Development Studies*.
- Putra, I. G., & Lestari, P. (2024). Inter-organizational communication barriers in village governance systems. *International Journal of Public Administration*, 47(4), 299–312.
- Putri, A. (2022). Manajemen pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), 90–99.
- Raharjo, M. M. (2021). Tata kelola pemerintahan desa. Jakarta: Bumi Aksara.
- Raharjo, M. M. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Desa. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahman, A., & Hidayat, D. (2021). Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(2), 93–106.
- Rahman, D., & Prasetyo, H. (2022). Penguatan kerjasama antar desa berbasis partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Pemerintahan dan Pembangunan Desa*, 11(1), 72–86.
- Rahman, F. (2021). Musyawarah desa dalam perencanaan pembangunan. *Jurnal Politik Lokal*, 6(3), 101–110.
- Rahman, F., & Hidayat, A. (2021). Sinergi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam pembangunan desa berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(2), 98–111.

- Rahman, F., & Hidayati, N. (2022). Keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 11(1), 73–86.
- Rahman, F., & Kurniawan, B. (2022). Regulatory challenges in village governance and institutional accountability in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(1), 55–70.
- Rahman, F., & Nugroho, D. (2021). Tata kelola pemerintahan desa dan pengaruhnya terhadap efektivitas pembangunan desa. *Jurnal Pemerintahan dan Pembangunan Desa*, 9(2), 91–104.
- Rahman, F., & Wibowo, H. (2022). Kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa desa. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 10(1), 55–68.
- Rahman, F., & Wicaksono, A. (2021). Kualitas pelayanan publik desa dan kepuasan masyarakat desa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(2), 88–101.
- Rahman, F., & Wicaksono, D. (2021). Penegakan hukum dalam pemerintahan desa dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas desa. *Jurnal Pemerintahan dan Pembangunan Desa*, 9(1), 90–103.
- Rahmawati, N., & Arifin, M. (2022). Kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 44–57.
- Rahmawati, N., & Nugroho, F. (2021). Pengaruh transparansi pemerintahan desa terhadap kepercayaan masyarakat desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(2), 95–108.

- Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2020). Keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai penguatan ekonomi desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1068–1076.
- Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2020). Keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai penguatan ekonomi desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1068–1076.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38682/uu-no-6-tahun-2014>
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 68.
- Rondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective: Theory and practice in developing countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133–145.
<https://doi.org/10.1177/002085238104700205>
- Santoso, E. (2023). Fungsi kepala seksi dalam pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 88–97.
- Sari, D., & Nugroho, F. (2021). Transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap efektivitas pembangunan desa. *Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 101–114.

- Sari, D., & Nugroho, R. (2022). Konflik kewenangan dalam tata kelola pemerintahan desa pasca implementasi Undang-Undang Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 145–158.
- Sari, N. (2021). Fungsi BPD dalam pengawasan pemerintahan desa. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 10(1), 50–60.
- Sembiring, J., et al. (2023). Decentralization and village financial management in Indonesia. *Indonesian Journal of Public Administration*.
- Setiawan, R. (2022). Tugas kepala urusan dalam administrasi desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 70–80.
- Siregar, D. D. (2020). Manajemen aset strategi penataan konsep pembangunan berkelanjutan secara nasional dalam konteks kepala daerah sebagai CEO's pada era globalisasi dan otonomi daerah. Gramedia Pustaka Utama.
- Solekhan, M. (2014). Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat (Vol. 1). Setara Press.
- Solekhan, M. (2020). Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat. Setara Press.
- Solekhan, M. (2020). Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat. Setara Press.
- Solekhan, M. (2021). Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat. Malang: Setara Press.
- Solekhan, M. (2021). Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat. Setara Press.
- Solekhan, M. (2022). Pemerintahan desa dan kemitraan kelembagaan. Malang: Setara Press.

- Solihatin, E., & Syafrudin, I. (2022). Otonomi daerah. Depok: Rajawali Press.
- Solihatin, E., & Syafrudin, I. (2022). Otonomi daerah. Depok: Rajawali Press.
- Suryaman, L. M., Muchsin, S., & Sekarsari, R. W. (2021). Perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dalam perspektif good governance: Kajian tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Suryani, D., & Wicaksono, A. (2021). Pemanfaatan media digital desa dalam mendukung transparansi pemerintahan desa. *Jurnal Teknologi dan Pemerintahan*, 8(2), 92–105.
- Suryono, H. (2021). Sistem pemerintahan desa di Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Sutoro, E. (2021). Desa membangun Indonesia. *Forum Pengembangan Pembaharuan Desa*.
- Sutoro, E. (2021). Desa membangun Indonesia. *Forum Pengembangan Pembaharuan Desa*.
- Sutoro, E. (2021). Desa membangun Indonesia. *Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)*.
- Sutoro, E. (2021). Desa membangun Indonesia. *Forum Pengembangan Pembaharuan Desa*.
- Sutoro, E. (2021). Desa membangun Indonesia. *Forum Pengembangan Pembaharuan Desa*.
- Sutoro, E. (2021). Desa membangun Indonesia. *Forum Pengembangan Pembaharuan Desa*.

- Sutoro, E. (2021). Desa membangun Indonesia. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Sutoro, E. (2021). Desa membangun Indonesia. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Sutoro, E. (2021). Desa membangun Indonesia. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Sutoro, E. (2021). Desa membangun Indonesia. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Sutoro, E. (2021). Desa membangun Indonesia. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Sutoro, E. (2021). Desa membangun Indonesia. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Sutoro, E. (2021). Desa membangun Indonesia. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Sutoro, E. (2021). Desa membangun Indonesia. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Sutoro, E. (2021). Desentralisasi dan tata kelola pemerintahan desa. IRE Press.
- Sutoro, E. (2021). Desentralisasi dan tata kelola pemerintahan desa. IRE Press.
- Sutrisno, E. (2023). Peran Karang Taruna dalam pengembangan kapasitas pemuda desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(2), 145–158.
- Sutrisno, E. (2024). Tantangan kelembagaan dalam tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(1), 77–91.

- Suyanto, A., Masulili, A., Youlla, D., & Setiawan, F. (2020). RKPDES: A yearly village development work-plan in Indonesia. Proceedings of the 6th International Conference on Community Development. <http://repository.unitomo.ac.id/2147/1/Jurnal%20Proceding%20Brunai.pdf>
- Tajudin, A., Hutasoit, J. A., & Oktafiandri, A. N. (2025). Accountability in the management of village funds under Law No. 6 of 2014: An analysis of good governance implementation. *Rechtsvinding*, 3(2), 195–206. <https://journal.civiliza.org/index.php/rechtsvinding/article/download/1070/937/5236>
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa.

United Nations Committee of Experts on Public Administration.
(2018). Principles of effective governance for sustainable
development. ECOSOC.

[https://publicadministration.desa.un.org/intergovernmental-
support/cepa/principles-effective-governance-sustainable-
development](https://publicadministration.desa.un.org/intergovernmental-support/cepa/principles-effective-governance-sustainable-development)

United Nations Development Programme. (1997). Governance for
sustainable human development: A UNDP policy document.
UNDP. <https://digitallibrary.un.org/record/492551>

Van Dijk, J. A. G. M. (2020). The digital divide. Polity Press.

Visvizi, A., & Lytras, M. D. (Eds.). (2018). Smart villages in the EU
and beyond. Emerald Publishing.

Wahyudi, A., & Prasetyo, R. (2022). Perencanaan pembangunan
desa yang terstruktur melalui RPJMDes dan RKPDes dalam
memperkuat kemandirian desa. Jurnal Administrasi Publik
dan Pemerintahan.

Wasistiono, S., & Tahir, I. (2020). Prospek pengembangan desa.
Fokusmedia.

- Wicaksono, A., & Hidayati, N. (2021). Pengawasan pengadaan barang dan jasa desa dalam mewujudkan akuntabilitas pembangunan desa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(2), 98–111.
- Widianingsih, I., & Mulyawan, R. (2023). Village government's risk management and village fund administration in Indonesia. *Sustainability*, 15(24), 16706. <https://doi.org/10.3390/su152416706>
- Widiatmoko, F. (2022). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes 2021–2027 di Desa Cepedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. *Jurnal Administrasi Publik*, 90–97.
- Widjaja, H. A. W. (2020). Otonomi desa: Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh. RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, H. A. W. (2020). Otonomi desa: Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh. RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, H. A. W. (2020). Otonomi desa: Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh. RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, H. A. W. (2020). Otonomi desa: Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh. RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, H. A. W. (2020). Otonomi desa: Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh. RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, H. A. W. (2020). Otonomi desa: Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh. RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, H. A. W. (2020). Otonomi desa: Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh. RajaGrafindo Persada.

- Widjaja, H. A. W. (2020). Otonomi desa: Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh. RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, H. A. W. (2020). Otonomi desa: Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh. RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, H. A. W. (2020). Otonomi desa: Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh. RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, H. A. W. (2020). Otonomi desa: Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh. RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, H. A. W. (2020). Otonomi desa: Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh. RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, H. A. W. (2020). Otonomi desa: Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh. RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, H. A. W. (2020). Otonomi desa: Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh. RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, H. A. W. (2020). Otonomi desa: Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh. RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, H. A. W. (2020). Otonomi desa: Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh. RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, H. A. W. (2022). Otonomi desa dan pelayanan publik. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, H. A. W. (2022). Otonomi desa dan tata kelola pemerintahan desa. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wijaya, A. (2022). Good governance dalam pemerintahan desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 25–35.

- Wijayanti, D. (2023). Lembaga kemasyarakatan desa dan pembangunan partisipatif. *Jurnal Sosial dan Politik*, 8(2), 95–104.
- Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Geyer, C. (2019). Artificial intelligence and the public sector: Applications and challenges. *International Journal of Public Administration*, 42(7), 596–615.
<https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1498103>
- World Bank. (1994). *Governance: The World Bank's experience*. World Bank Publications.
- World Bank. (2020). Indonesian village governance under the new Village Law 2015–2018: Sentinel villages report (Report No. AUS0001377). World Bank Group.
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/220661590726265687/pdf/Indonesian-Village-Governance-Under-the-New-Village-Law-2015-2018-Sentinel-Villages-Report.pdf>
- World Bank. (2022). Digital development and digital economy: Building foundations for a digital future. World Bank Group.
<https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1741-5>
- Wulandari, N., et al. (2021). Community participation in village development planning: Evidence from Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Pemerintahan*, 6(3), 201–214.
- Yuliana, R. (2020). Akuntabilitas pemerintahan desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(2), 40–49.

Yusuf, M., & Hamzah, A. (2023). Penguatan sinergi kelembagaan desa dalam pembangunan partisipatif. *Jurnal Governance Indonesia*, 6(2), 101–115.

Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L. (1990). *Delivering quality service: Balancing customer perceptions and expectations*. Free Press.

Buku referensi berjudul **Tata Kelola Pemerintahan Desa** membahas berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Di dalamnya dijelaskan peran pemerintah desa, pengelolaan administrasi, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, serta hubungan antara pemerintah desa dan warga dalam mewujudkan kemajuan desa.

Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, buku ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika pemerintahan desa di tengah perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Cocok untuk masyarakat umum yang ingin memahami tata kelola desa serta perannya dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan di tingkat lokal.